



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Jalan Jenderal Achmad Yani No.114

☎ 0561-732065-732067 Fax.0561-732065

Email : pengadilantinggipontianak@gmail.com Website : www.pt-pontianak.go.id

PONTIANAK, 78124

Pontianak, 30 September 2020

Nomor : W17-U / 2086 /OT.01.2/9/2020
Lampiran : 1 (satu) Eksamplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

Di -

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 28A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding seluruh lingkungan Peradilan disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Menilai kinerja instansi.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. - Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.
Setiap jawaban "**Ya**" akan diberikan nilai **1**, sedangkan jawaban "**Tidak**" akan diberikan nilai **0**, untuk jawaban **a/b/c/d/e**, penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria	Nilai
a	Memenuhi hampir semua kriteria (> 80% s/d 100%)	1
b	Memenuhi sebagian besar kriteria (>60% s/d 80%)	0,75
c	Memenuhi sebagian kriteria (>40% s/d 60%)	0,50
d	Memenuhi sebagian kecil kriteria (> 20% s/d 40%)	0,25
e	Sangat kurang memenuhi kriteria (\leq 20%)	0

4. Pengadilan Negeri Ketapang mendapat nilai **73,76%** dengan kategori tingkat akuntabilitas kinerja "BB". Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2018
a.	Perencanaan Kinerja	35	25,17	26,81
b.	Pengukuran Kinerja	20	15,08	15,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,38	10,38
d.	Evaluasi Kinerja	10	8,13	8,13
e.	Capaian Kinerja	20	15,00	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,76	75,81
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja = Bobot 35% nilai yang diperoleh 25,17%:

- 1) Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja menunjukkan bahwa sistem perencanaan kinerja sudah baik ;
- 2) Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) di lakukan reuiu, dan merupakan bagian yang telah dimanfaatkan untuk penyusunan LKjIP 2019.
- 3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021 sudah ada, mengacu pada Reviu Renstra Pengadilan Negeri Ketapang Tahun 2015-2019 dan rancangan Renstra PN Ketapang Tahun 2020-2024, sedangkan RKT Tahun 2019 merupakan bagian dari LKjIP tahun 2019.
- 4) Penetapan Kinerja (PK) sudah ada, dengan indikator kinerja yang terukur, dan sudah dijadikan sebagai sarana alat ukur keberhasilan unit kerja, serta sudah sebagian besar selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan.

b. Pengukuran Kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh 15,08%:

- 1) Telah terdapat pengukuran atas indikator kinerja yang sudah ditetapkan sehingga hasil pengumpulan data kinerja sudah dapat digunakan untuk menyusun laporan kinerja, walaupun masih ada bersifat out put.
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah disusun dan ditetapkan sebagai alat ukur keberhasilan entitas organisasi, sehingga dapat mengukur kinerja satker.
- 3) Indikator Kinerja Utama (IKU) formal yang ditetapkan Pengadilan Negeri Ketapang sudah direviu dalam satu dokumen.

c. Pelaporan Kinerja = Bobot 15% nilai yang diperoleh 10,38%:

- 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 telah disusun dan disampaikan tepat waktu.

- 2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun menginformasikan capaian kinerja utama organisasi seperti perbandingan capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya dan realisasi tahun ini dengan akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini.

d. Evaluasi Kinerja = Bobot 10% nilai yang diperoleh 8.13% :

Monitoring dan Evaluasi sudah dilaksanakan namun hasilnya belum ditindaklanjuti secara menyeluruh.

e. Pencapaian Kinerja = Bobot 20% nilai yang diperoleh 15,00% :

Aspek ketepatan indikator-indikator, capaian target out put/out come, ketepatan target, kehandalan informasi kinerja dan keselarasan kinerja, menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja output cukup memuaskan. Hal tersebut lebih disebabkan oleh ketepatan dalam merumuskan sasaran dan indikatornya, sehingga sudah tampak uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan, walaupun pencapaian outcome masih perlu ditingkatkan.

f. Rekomendasi tahun lalu yang belum ditindak lanjuti, diantaranya:

- Pemanfaatan LKjIP untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program, pemanfaatan belum sepenuhnya atas dokumen formal.
- Peningkatan pencapaian outcome, dengan pemantauan data secara periodik dari target yang sudah ditentukan.

6. Pengadilan Negeri Ketapang memperoleh nilai sebesar **73,76% (BB)** atau Sangat Baik.

7. Rekomendasi.

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

- 1) Mempertahankan penerapan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang, walau belum sepenuhnya pemanfaatan dokumen formal.
- 2) Menindak lanjuti rekomendasi tahun lalu untuk pemanfaatan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pengadilan Negeri Ketapang, dalam mencapai program yang telah ditentukan.
 - Dalam Pelaporan Kinerja untuk disempurnakan informasi kinerja dalam LKjIP dengan analisis yang lebih mendalam dan memperhatikan capaian target indikator kinerja setiap sasaran serta dilengkapi dengan berbagai perbandingan capaian kinerja, agar memperoleh informasi kinerja yang memadai dari tahun ke tahun sesuai periode Renstra dan menambah daya guna LKjIP sebagai sumber informasi dalam upaya perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan pencapaian kinerja periode selanjutnya.
 - Dalam Pencapaian Kinerja agar dirumuskan sasaran dan indikator kinerja dengan memperhatikan target yang telah ditetapkan, ketepatan indikator kinerja, kehandalan informasi dan keselarasan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pengadilan, sehingga uraian pelaksanaan kegiatan dan proses yang telah dilakukan menggambarkan kinerja atau output/outcome yang memadai
- 3) Menyelaraskan indikator kinerja pada RKT dengan indikator kinerja pada rencana strategis
- 4) Tujuan pada renstra belum berorientasi hasil, karena menggunakan kata meningkatkan yang merupakan sebuah proses.

- 5) Target indikator sasaran pada rencana strategis belum tepat, yaitu pada indikator survei responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
- 6) Matrik Renstra yang dibuat tidak sesuai dengan matrik renstra yang ditentukan dalam aplikasi Komdanas
- 7) Sasaran pada RKT belum berorientasi hasil, karena menggunakan kata peningkatan yang merupakan sebuah proses
- 8) Sasaran pada PK belum berorientasi hasil, karena menggunakan kata peningkatan yang merupakan sebuah proses.
- 9) Menyelaraskan target pada PK dengan target pada RKT.
- 10) Kinerja Utama pada IKU belum berorientasi hasil, karena menggunakan kata peningkatan yang merupakan sebuah proses.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Ketapang tahun 2019, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

H. AMIRYAT, S.H., M.H
NIP. 195502221983031002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kementerian PAN dan RB